



KAJIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN FASILITASI KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN TAPIN



**Kerjasama
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Tapin**

Dengan

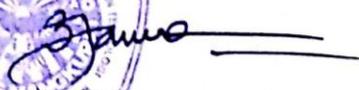
**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat**

Universitas Lambung Mangkurat

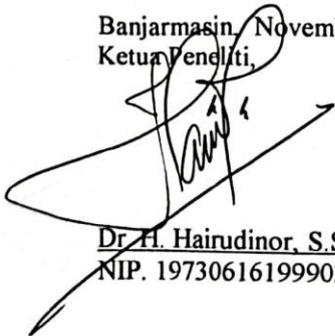
Tahun 2022

Halaman Pengesahan

1. Judul Penelitian : Kajian Pemberian Insentif dan Fasilitasi Kemudahan Penanaman Modal Kabupaten Tapin
2. Lokasi : Kabupaten Tapin
3. Penanggung Jawab : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat
4. Ketua Peneliti
a. Nama : Dr. H. Hairudinor, S.Sos., M.M.
b. Jabatan/Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I/Lektor Kepala/IVa
c. Alamat Instansi : Jl. Brigjen Hasan Basri Banjarmasin
Telp. (0511) 3302789
5. Anggota Peneliti : Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag, SH, M.Hum.
Dr. Erlina., S.H., M.H.
6. Lembaga : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat
7. Sumber Dana : APBD Kabupaten Tapin
8. Periode Pelaksanaan : Tahun Anggaran 2022

Ketua LPPM ULM,


Prof. Dr. Ir. H. Danang Biyatmoko, M.Si.
NIP. 196805071993031020

Banjarmasin, November 2022
Ketua Peneliti,

Dr. H. Hairudinor, S.Sos., M.M.
NIP. 197306161999031003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan.....	3
1.3. Sasaran	3
1.4. Ruang Lingkup	3
1.4.1. Lingkup Wilayah.....	4
1.4.2. Lingkup Materi	6
1.5. Metodologi	7
1.6. Kerangka Pemikiran.....	14
BAB II PEREKONOMIAN DAN INVESTASI KABUPATEN TAPIN	15
2.1. Kebijakan Perekonomian	15
2.1.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin.....	15
2.1.2. Peraturan-Peraturan tentang Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.....	17
2.2. Potensi Ekonomi Kabupaten Tapin.....	23
2.2.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tapin.....	23
2.2.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapin Tahun 2017-2021	25
2.2.3. Struktur Ekonomi Kabupaten Tapin.....	27
2.2.4. Sektor Unggulan Kabupaten Tapin.....	28
2.2.5. Analisis Shift Share	30
BAB III KEBIJAKAN PEMBERIAN INSENTIF DAN FASILITASI KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL	36
3.1. Pola Umum Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.....	36
3.2. Pengaruh Kebijakan Insentif.....	39
3.3. Kendala Implementasi Kebijakan Insentif dan Kemudahan Investasi.....	41
3.4. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Investasi	42
3.5. Analisis SWOT Kebijakan Insentif dan Kemudahan Investasi	45
3.5.1. Identifikasi Faktor Internal	46
3.5.2. Identifikasi Faktor Eksternal.....	47
BAB IV STRATEGI PEMBERIAN INSENTIF DAN FASILITASI KEMUDAHAN	

PENANAMAN MODAL KABUPATEN TAPIN	52
DAFTAR ISI	
4.1. Fokus Pemberian Insentif dan Fasilitasi Kemudahan Penanaman Modal Kabupaten Tapin	52
4.2. Arah dan Strategi Kebijakan	56
BAB V PENUTUP	59
DAFTAR PUSTAKA	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tapin (Juta Rupiah) Tahun 2017-2021.....	24
Tabel 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Tapin Tahun 2017-2021 ...	26
Tabel 3. Struktur Ekonomi Kabupaten Tapin Tahun 2017-2021	27
Tabel 4. Perhitungan besaran nilai LQ per sektor Kabupaten Tapin tahun 2017 sampai dengan 2021	29
Tabel 5. Shift Share Sektor Kab. Tapin Tahun 2017-2021.....	32
Tabel 6. Analisis Model Shift-Share Pendekatan Proportional Shift (PS) dan Differential Shift (DS) Kabupaten Tapin.....	34
Tabel 7. Matriks SWOT Penanaman Modal Kabupaten Tapin.....	49
Tabel 8. Fokus Pemberian Insentif dan Fasilitas Kemudahan Penanaman Modal Kabupaten Tapin.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Tapin.....	5
Gambar 2, Matriks SWOT Kearns.....	13
Gambar 3. Kerangka Pemikiran	14
Gambar 4. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapin Tahun 2017-2021	25
Gambar 5. Pola Umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengembangan penanaman modal merupakan kebijakan yang membawa dampak ekonomi cukup luas, yaitu terjadinya peningkatan jumlah barang dan jasa, penciptaan nilai tambah, penggunaan tenaga kerja, dan sumber daya ekonomi lainnya, peningkatan pendapatan masyarakat, serta sebagai sumber pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi. Menurut Syaihu (2012) bahwa investasi swasta dan investasi pemerintah memberikan pengaruh secara bersama-sama terhadap kesempatan kerja, investasi swasta dan investasi pemerintah juga memberikan pengaruh secara bersama-sama terhadap pengangguran. Hal itu sejalan dengan Sadono Sukirno (2000) kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan, dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni: (1) Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja. (2) Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi. (3) Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

Pengembangan penanaman modal di daerah, selain untuk meningkatkan kapasitas ekonomi daerah yang secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, juga akan berdampak positif bagi peningkatan kapasitas fiskal daerah. menurut Harrod-Domar investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi (Mulyadi, 2002:8). Untuk mendukung kapasitas produksi yang besar tersebut tentunya diperlukan tenaga kerja sehingga otomatis peluang kesempatan kerja akan terbuka

sehingga kesimpulannya semakin tinggi investasi pemerintah yang ditanamkan maka tingkat kesempatan kerja pun akan meningkat.

Konsep dasar pengembangan penanaman modal tentu diarahkan pada peningkatan produktivitas secara agregat. Untuk mencapai itu, diperlukan dukungan iklim penanaman modal yang “conducive”, antara lain adalah (1) adanya kepastian, kestabilan dan keamanan; (2) Stabilitas makro ekonomi (inflasi, suku bunga dan kurs, sistem moneter dan fiskal yang sustainable); (3) Reformasi birokrasi, perpajakan, kebijakan, aturan; (4) Penyediaan infrastruktur yang cukup (listrik, air, pelabuhan, jalan, dan sebagainya); (5) Tenaga kerja yang mengacu pada produktivitas; (6) SDM, pendidikan, kesehatan, disiplin, motivasi; (7) Setiap daerah harus fokus pada sektor industri unggulan; dan (8) Menjalinkan kerjasama sinergis antar daerah.

Kemampuan daerah untuk menggunakan sumber daya alam dan bakat lokal untuk mendukung inovasi yang kuat adalah kunci penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh sebab itu, langkah pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah adalah mengenali kekuatan inovasi yang menciptakan keberhasilan usaha, seperti kemampuan untuk mentransformasi gagasan dan pengetahuan baru dalam membuat barang atau pelayanan yang berkualitas. Pada hakekatnya, penanaman modal merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, pihak swasta, dan institusi lain baik dari luar maupun dalam negeri agar pertumbuhan ekonomi yang diinginkan dapat tercapai. Secara sederhana kegiatan penanaman modal merupakan pendapatan yang dibelanjakan oleh perusahaan atau lembaga pemerintah untuk barang-barang modal yang akan digunakan untuk kegiatan produktif.

Peran penanaman modal menjadi strategis dalam suatu perekonomian. Tanpa penanaman modal yang cukup tidak dapat diharapkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan serta peningkatan kesejahteraan ekonomimasyarakat. Kebijakan

penanaman modal yang tepat diharapkan dapat menjadi pemicu perluasan kesempatan kerja di suatu daerah. Menurut Tambunan (2001:76) investasi merupakan suatu faktor krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi (*sustainable development*), atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan adanya kegiatan produksi maka terciptalah kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat meningkat yang selanjutnya dapat menciptakan serta meningkatkan permintaan di pasar. Pendapat tersebut menjelaskan tentang pengaruh yang ditimbulkan oleh investasi, dimana munculnya investasi akan mendorong kesempatan kerja dan peningkatan terhadap pendapatan.

1.2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai adalah **menentukan arahan pemberian insentif terhadap penanaman modal dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tapin.**

1.3. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai dalam kajian ini adalah :

1. Identifikasi Potensi Ekonomi Kabupaten Tapin;
2. Identifikasi Investasi di Kabupaten Tapin;
3. Identifikasi Kebijakan Insentif Terhadap Penanaman Modal; dan
4. Penentuan Kebijakan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

1.4. Ruang Lingkup

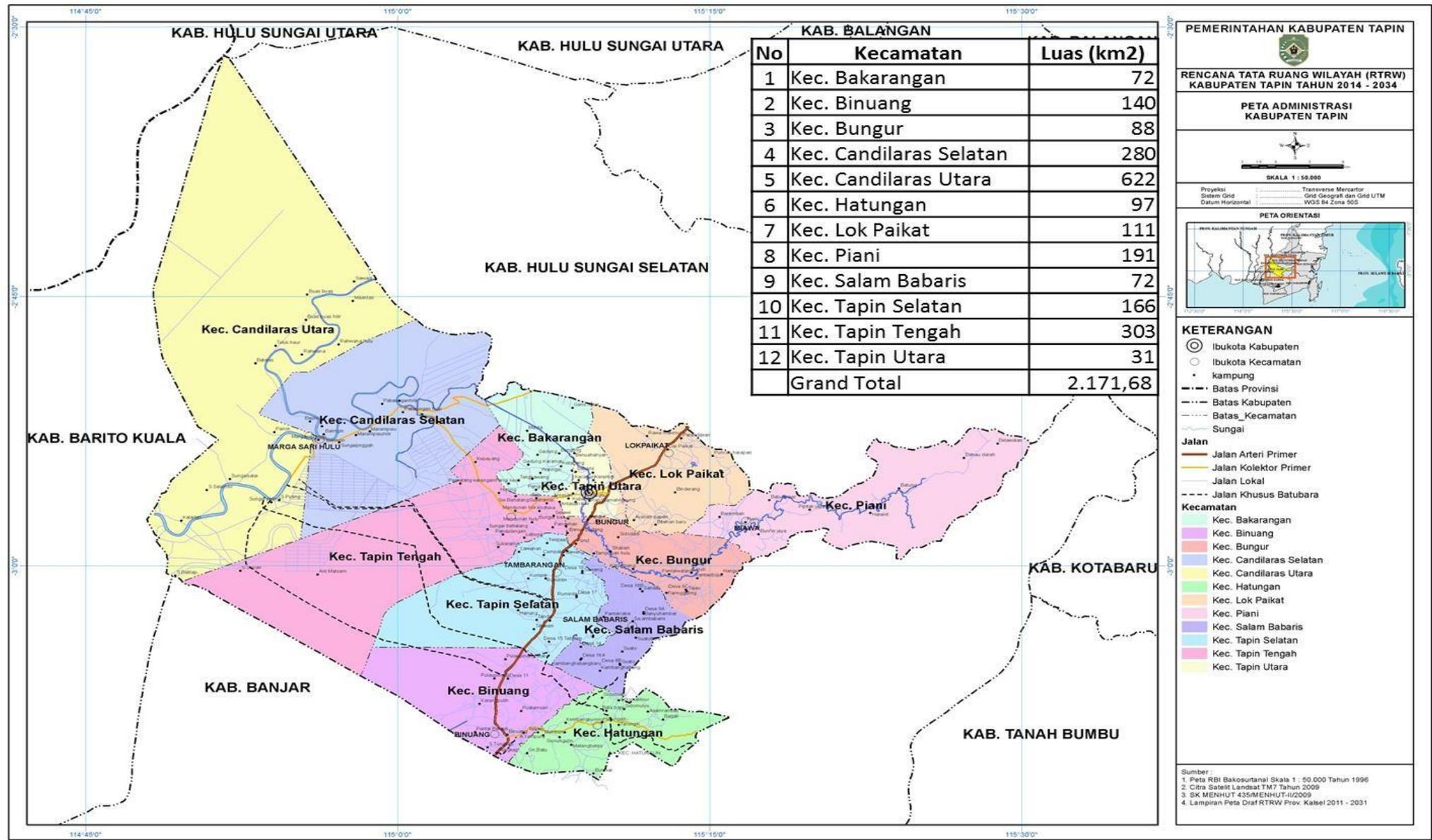
Ruang lingkup dalam kajian ini terdiri dari ruang lingkup materi dan ruang lingkup wilayah. lingkup materi merupakan batasan terhadap materi yang menjadi batasan dalam kajian ini, sedangkan lingkup wilayah merupakan batasan terhadap wilayah yang menjadi objek kajian. Adapun penjelasannya sebagai berikut.

1.4.1. Lingkup Wilayah

Ruang lingkup yang dikaji dalam kajian ini adalah Kabupaten Tapin yang mempunyai luas wilayah 2.174,95 km², yang merupakan 4,23% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Secara geografis Kabupaten Tapin terletak diantara 2^o11'40" – 3^o11'50" Lintang Selatan dan 114^o4'27" – 115^o3'20" Bujur Timur. Posisi Kabupaten Tapin dalam konstelasi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sangat strategis karena di bagian Timur terletak pada jalur arteri primer yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Tapin sedangkan bagian Barat terletak pada jalur arteri primer yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah.

Kabupaten Tapin mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Kabupaten Banjar
- Sebelah Barat : Kabupaten Barito Kuala
- Sebelah Selatan : Kabupaten Banjar
- Sebelah Utara : Kabupaten Hulu Sungai Selatan



Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Tapin

1.4.2. Lingkup Materi

Lingkup materi dalam kajian ini perlu dibatasi supaya lebih terarah serta berjalan dengan baik, Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini, yaitu:

1. Membahas Potensi Ekonomi Wilayah

Pembahasan tentang potensi ekonomi wilayah diperlukan dalam melihat potensi ekonomi, jenis sektor unggulan yang sudah dimiliki atau potensial untuk dikembangkan, serta melihat seberapa jauh sektor tersebut akan dapat mendorong proses pembangunan di Kabupaten Tapin. Potensi ekonomi wilayah dilihat menggunakan dua pendekatan melalui potensi dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan melihat potensi sektor Basis.

a) Melihat Potensi PDRB

Potensi PDRB bertujuan untuk melihat nilai produksi yang dihasilkan oleh setiap sektor selama 5 tahun yang ada di Kabupaten Tapin, selain itu dapat dilihat juga struktur perekonomian yang ada, dan laju pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu 5 tahun.

b) Melihat Potensi Sektor Basis

Potensi sektor basis merupakan satu pendekatan yang digunakan untuk memahami sektor kegiatan yang menjadi pemacu pertumbuhan, sektor – sektor yang menjadi pemacu pertumbuhan (basis) basis dapat meningkatkan ekspor yang secara jangka panjang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Potensi sektor basis menggunakan analisis location quotient (LQ). Menurut Rusasta et al (2002) LQ merupakan suatu alat pengembangan ekonomi yang mengukur derajat spesialisasi kegiatan ekonomi melalui pendekatan perbandingan, ada 2 klasifikasi sektor dalam metode analisis LQ yaitu sektor basis dan sektor non basis.

2. Investasi

Dornbusch & Fischer berpendapat bahwa investasi adalah permintaan barang

dan jasa untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi atau pendapatan di masa mendatang. Peningkatan investasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan tingkat pendapatan, kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan taraf kemakmuran (Sukirno, 2000). Investasi yang dibahas adalah investasi PMDN dan PMDA terhadap sektor di Kabupaten Tapin. Adapun pendekatan yang digunakan untuk melihat potensi investasi di Kabupaten Tapin dilihat dari tiga pendekatan berikut:

a) Perkembangan Investasi di Kabupaten Tapin.

Melihat perkembangan investasi di Kabupaten Tapin selama kurun waktu 5 tahun;

b) Pengaruh Perkembangan Investasi dan Kemudahan Penanaman Modal. Melihat pengaruh perkembangan investasi di Kabupaten Tapin selama kurun waktu 5 tahun menggunakan pendekatan analisis regresi berganda;

c) Melihat *Efisiensi* Penggunaan Modal (Investasi terhadap pertumbuhan ekonomi).

3. Insentif

Insentif yang dibahas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2008 yaitu Insentif yang berupa dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah. Adapun pendekatannya melalui penelusuran pustaka terhadap tinjauan peraturan daerah tentang investasi dan kemudahan investasi di Kabupaten Tapin.

1.5. Metodologi

Kajian ini menggunakan beberapa pendekatan utama, yaitu pendekatan perencanaan berbasis stakeholders. Model pendekatan dalam studi penyusunan kebijakan strategik ini dikembangkan secara partisipatif (*participatory approach*). Pendekatan ini menjembatani dua kutub kepentingan dan kebutuhan dari

masyarakat umum, swasta/pelaku usaha, dan dari pemerintah sehingga tumpuan analisis lebih dititik beratkan pada pemenuhan kebutuhan stakeholders. Adanya peningkatan penanaman modal juga akan meningkatkan Pedapatan Asli Daerah (PAD) yang berimplikasi pada peningkatan sumber-sumber APBD sehingga dana publik tersebut dapat dialokasikan untuk pelayanan publik dan pembangunan daerah. Dengan demikian, secara langsung diyakini kegiatan ini akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas.

Analisis yang digunakan untuk merumuskan kebijakan strategik untuk akselerasi penanaman modal di daerah menggunakan alat analisis:

(1) Studi Kepustakaan

Analisis ini digunakan untuk mereview berbagai data dan informasi yang terkumpul dari dokumen-dokumen perencanaan, hasil penelitian, buku dan peraturan yang relevan.

(2) Analisis Ekonomi

Analisis Ekonomi yang digunakan untuk melihat potensi wilayah ekonomi dari mulai struktur ekonomi di Kabupaten Tapin, Laju pertumbuhan PDRB selama kurun waktu 5 tahun, Analisis Sektor Basis. Analisis Ekonomi yang digunakan adalah:

a) Analisis PDRB Wilayah

Perhitungan pendapatan regional atau wilayah (PDRB) akan memberikan suatu latar belakang dan perspektif mengenai pendapatan daerah dan gambaran keadaan masyarakatnya. Kegunaan analisis PDRB Untuk melihat gambaran perekonomian dan perkembangan ekonomi suatu wilayah, baik secara makro maupun sektoral dan Indikator gambaran dan perkembangan ekonomi. Analisis PDRB yang dilihat adalah :

➤ **Tingkat pertumbuhan ekonomi**

Perhitungan LPE untuk data PDRB atas dasar harga konstan dilakukan dengan cara dihitung secara langsung dari data PDRB/pendapatan riil yang ada.

Rumus LPE atas dasar harga konstan:

$$\frac{\text{PDRB } n \text{ (riil)} - \text{PDRB } n-1 \text{ (riil)}}{\text{PDRB (riil) } n-1} \times 100\%$$

➤ **Struktur perekonomian**

Berdasarkan besar kontribusi/peranan/sumbangan dari masing-masing sektor terhadap jumlah PDRB/pendapatan secara keseluruhan dari suatu daerah dapat ditentukan corak atau karakteristiknya, apakah termasuk daerah berkarakteristik pertanian, industri atau kegiatan lainnya.

Rumus Kontribusi Sektor:

$$\frac{\text{Nilai PDRB Sektor } i}{\text{Nilai PDRB total}} \times 100\%$$

b) Analisis LQ

Teori ekonomi basis mengklasifikasikan seluruh kegiatan ekonomi ke dalam 2(dua) sektor, yaitu sektor basis dan sektor non basis. Deliniasi wilayah dilakukan berdasarkan konsep – konsep perwilayahan yaitu konsep homogenitas, nodalitas dan konsep administrasi. Kegiatan basis adalah suatu kegiatan masyarakat yang hasilnya baik berupa barang maupun jasa dan ditujukan untuk ekspor keluar dari lingkungan masyarakat atau yang berorientasi keluar, regional, nasional dan internasional. Konsep efisiensi teknis maupun efisiensi ekonomis sangat menentukan dalam pertumbuhan

basis suatu wilayah. Sedangkan kegiatan non basis merupakan kegiatan masyarakat yang hasilnya baik berupa barang atau jasa diperuntukan bagi masyarakat itu sendiri dalam kawasan kehidupan ekonomi masyarakat tersebut. Konsep swasembada, mandiri, kesejahteraan dan kualitas hidup sangat menentukan dalam kegiatan non basis ini.

Secara garis besar gambaran dari alat analisis ini adalah sebagai berikut:

- Teknik analisis *Location Quotient* (LQ) merupakan cara permulaan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam sektor kegiatan tertentu.
 - Teknik analisis *Location Quotient* (LQ) telah cukup memberi gambaran akan kemampuan daerah yang bersangkutan dalam sektor yang diamati. Analisis LQ digunakan untuk mengidentifikasi potensi internal yang dimiliki suatu daerah yaitu sektor-sektor mana yang merupakan sektor basis (basic sektor) dan sektor mana yang bukan sektor basis (non basic sektor). Pada dasarnya teknik ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan satu sektor antara daerah yang diselidiki dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang lebih luas. Perbandingan relatif ini dapat dinyatakan secara matematika sebagai berikut (Warpani 2001):

$$LQ = \frac{Si/s}{Ni/N}$$

Keterangan:

LQ : Nilai Location Quotient

Si : PDRB Sektor i di Kabupaten Tapin

S : PDRB total di Kabupaten Tapin

Ni : PDB Sektor i Provinsi Kalimantan Selatan

N : PDB total di Provinsi Kalimantan Selatan

Nilai LQ dapat memberikan gambaran apakah daerah yang diteliti telah mengalami keseimbangan atau belum dalam kegiatan tertentu. Secara lebih jelas indikasi berdasarkan nilai LQ sebagai berikut:

1. **LQ > 1**: memberikan arti daerah yang diselidiki memiliki potensi ekspor dalam kegiatan tertentu (memiliki sektor basis).
2. **LQ < 1**: memberikan arti daerah yang diselidiki memiliki kecenderungan impor dari daerah lain dalam kegiatan tertentu (memiliki sektor non basis).
3. **LQ = 1**: memberikan arti daerah yang diselidiki telah mencukupi dalam kegiatan tertentu (seimbang).

(3) Deskriptif Kualitatif untuk kebijakan publik.

Analisis ini digunakan untuk mengetahui atau menggambarkan kecenderungan kebutuhan kebijakan publik yang terkait dengan pemberian insentif dan kemudahan bidang penanaman modal.

(4) Analisis SWOT

Suatu cara untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis dalam rangka merumuskan kebijakan berbagai strategi pengembangan penanaman modal daerah melalui pemberian insentif dan kemudahan investasi. Analisis ini didasarkan pada logika dapat memaksimalkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*). Analisis SWOT mempertimbangkan faktor lingkungan internal *strengths* dan *weaknesses* serta lingkungan eksternal *opportunities* dan *threats* yang dihadapi institusi/lembaga. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang (*opportunities*) dan ancaman dengan faktor internal kekuatan dan kelemahan sehingga dari analisis tersebut dapat diambil suatu keputusan strategik.

a. *Strength* (kekuatan)

Merupakan potensi yang sangat unit/potensial, bahkan tidak dapat ditemukan ditemukan ditempat lain, seperti karakter fisik yang berkaitan

dengan sumber daya alam tertentu, karakter sosial dan budaya, karakter ekonomi, dan sebagainya.

b. *Weakness* (kelemahan)

Permasalahan yang timbul selalu menjadi penghabat pertumbuhan wilayah, sehingga perkembangan dirasakan kurang terencana dan terkontrol.

c. *Opportunity* (peluang)

Potensi yang dimiliki suatu wilayah, terutama yang cenderung berorientasi pasar akan mengibas secara nyata bagi pertumbuhan kawasan dimasa datang, sehingga memberikan peluang optimis dalam pengembangannya maupun dalam menarik minat insvestor.

d. *Threat* (hambatan)

Potensi yang dimiliki, dapat pula menjadi ancaman bagi daerah yang kurang atau belum mampu / belum siap menerima tekanan perkembangan wilayah di sekitarnya, sehingga berakibat kurang menguntungkan dan pada akhirnya keuntungan akan tersedot oleh daerah-daerah disekitarnya yang sudah siap (modal luar). Seperti kebijakan pembangunan dalam era ekonomi daerah, dimana daerah- daerah yang mempunyai sumber daya alam akan mengalami pengembangan yang signifikan, tetapi akan menimbulkan ancaman atau hambatan apabila suatu daerah tidak hati-hati dalam mengelolanya.

Pendekatan kualitatif matriks SWOT sebagaimana dikembangkan oleh Kearns menampilkan delapan kotak, yaitu dua paling atas adalah kotak faktor eksternal (Peluang dan Tantangan) sedangkan dua kotak sebelah kiri adalah faktor internal (Kekuatan dan Kelamahan). Empat kotak lainnya merupakan kotak isu-isu strategis yang timbul sebagai hasil titik pertemuan antara faktor-faktor internal dan eksternal.

Matriks SWOT Kearns

EKSTERNAL INTERNAL	OPPORTUNITY	TREATHS
STRENGTH	<i>Comparative Advantage</i>	<i>Mobilization</i>
WEAKNESS	<i>Divestment/Investment</i>	<i>Dainage Control</i>

Sumber: Hisyam, 1998

Gambar 2, Matriks SWOT Kearns

Keterangan:

Sel A: *Comparative Advantages*

Sel ini merupakan pertemuan dua elemen kekuatan dan peluang sehingga memberikan kemungkinan bagi suatu wilayah untuk bisa berkembang lebih cepat.

Sel B: *Mobilization*

Sel ini merupakan interaksi antara ancaman dan kekuatan. Disini harus dilakukan

upaya mobilisasi sumber daya yang merupakan kekuatan wilayah untuk memperlunak ancaman dari luar tersebut, bahkan kemudian merubah ancaman itu

menjadi sebuah peluang.

Sel C: *Divestment/Investment*

Sel ini merupakan interaksi antara kelemahan wilayah dan peluang dari luar. Situasi seperti ini memberikan suatu pilihan pada situasi yang kabur. Peluang yang tersedia sangat meyakinkan namun tidak dapat dimanfaatkan karena kekuatan yang ada tidak cukup untuk menggarapnya. Pilihan keputusan yang diambil adalah (melepas peluang yang ada untuk dimanfaatkan organisasi lain) atau memaksakan menggarap peluang itu (investasi).

Sel D: *Damage Control*

Sel ini merupakan kondisi yang paling lemah dari semua sel karena merupakan pertemuan antara kelemahan wilayah dengan ancaman dari luar, dan karenanya keputusan yang salah akan membawa bencana yang besar bagi wilayah. Strategi yang harus diambil adalah *Damage Control* (mengendalikan kerugian) sehingga tidak menjadi lebih parah dari yang diperkirakan.

1.6. Kerangka Pemikiran



Gambar 3. Kerangka Pemikiran

BAB II

PEREKONOMIAN DAN INVESTASI KABUPATEN TAPIN

2.1. Kebijakan Perekonomian

2.1.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin

Visi pembangunan yang menjadi arah dan tujuan kegiatan pembangunan Kabupaten Tapin untuk 20 tahun ke depan yaitu : **“TAPIN YANG RELIGIUS DAN SEJAHTERA”** Dalam visi tersebut terkandung nilai-nilai yang dicita-citakan dan diidam-idamkan bersama oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tapin, bahwa visi Pembangunan Kabupaten Tapin tahun 2005-2025 mencerminkan keinginan seluruh komponen masyarakat akan arah dan tujuan kehidupan yang makmur secara lahir dan bathin. “Sejahtera” mengandung maknabahwa suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman yang memungkinkan bagi setiap masyarakat Kabupaten Tapin untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya.

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 adalah: **“BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS”**

Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa.
3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan

masyarakat.

5. Mengedepankan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan public yang maksimal (Good and Clean Government).

Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin, yaitu sebagai berikut:

Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Kabupaten Tapin.

Sasaran:

- a. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan.
- b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
- c. Meningkatnya daya beli masyarakat.
- d. Meningkatnya kualitas kehidupan social keagamaan.
- e. Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan gender.

Tujuan 2: Meningkatkan kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah.

Sasaran:

- a. Meningkatnya sektor agrobisnis.
- b. Meningkatnya sektor pariwisata.
- c. Meningkatnya sektor koperasi dan UKM.
- d. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa.
- e. Meningkatnya kemandirian pangan daerah.
- f. Menurunnya Pengangguran.

Tujuan 3.1: Meningkatkan kualitas infrastruktur.

Sasaran:

- a. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan.
- b. Meningkatnya kualitas jaringan air bersih.
- c. Meningkatnya kualitas jaringan irigasi.
- d. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik.

e. Meningkatnya ketersediaan jaringan komunikasi.

Tujuan 3.2: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Sasaran:

- a. Menurunnya pencemaran lingkungan.
- b. Meningkatnya kepatuhan terhadap perencanaan pemanfaatan lahan.
- c. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan.

Tujuan 4: Meningkatnya investasi.

Sasaran: Meningkatnya keamanan daerah

Tujuan 5: Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani masyarakat.

Sasaran:

- a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan.
- b. Meningkatnya kualitas ASN.
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat.

2.1.2. Peraturan-Peraturan tentang Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Peraturan – peraturan yang mengatur tentang insentif di Indonesia diatur dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah dan peraturan gubernur.

2.1.2.1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah. Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah bertujuan untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peran serta masyarakat dan selctor swasta dalam pembangunan daerah melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan BAB I Pasal 3 Pemberian Insentif dan/atau dilakukan berdasarkan prinsip: a) kepastian hukum; b) kesetaraan; c) transparansi; d)

akuntabilitas; dan e) efektif dan efisien.

Pemberian Insentif dan / atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu. Jenis usaha tertentu atau kegiatan tersebut terdiri atas:

- a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
- b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
- d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
- e. usaha yang dipersyaratkan dengan peizinan khusus;

- f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
- g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
- h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
- d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
- e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
- f. bunga pinjaman rendah.

2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:

- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
- h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;

- j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan sesuai dengan kemampuan daerah dan peraturan perundang-undangan.

2.1.2.2. Peraturan Presiden Republik Indonesia

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Bidang Usaha terbuka adalah Bidang Usaha yang bersifat komersil. Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha:

- a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau
- b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal. Bidang usaha tertutup yang dilarang sebagai kegiatan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. budi daya dan industri narkotika golongan I;
- b. segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino;
- c. penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam *Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*;
- d. pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan kapur kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (*recent death corals*) dari alam;
- e. industri pembuatan senjata kimia; dan

- f. industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon.

2.1.2.3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Fasilitasi Penanaman Modal Di Provinsi Kalimantan Selatan. Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Daerah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal kepada penanam modal di Daerah berdasarkan kewenangan, kondisi dan kemampuan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi penanam modal yang menanamkan modalnya di Daerah.

(1) **Pemberian insentif di Daerah** dapat berbentuk :

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- c. pemberian dana stimulan; dan/atau
- d. pemberian bantuan modal.

(2) **Pemberian kemudahan penanaman modal di Daerah** dapat berbentuk :

- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
- e. percepatan pemberian perizinan.

Penyediaan Fasilitas

- 1) Dalam hal penanaman modal, daerah membuka kesempatan atau peluang yang seluas-luasnya bagi penanam modal dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Peluang penanam modal sebagaimana dimaksud diarahkan kepada bidang-bidang usaha prioritas atau usaha unggulan.
- 3) Calon penanam modal yang menanamkan modalnya diberikan kemudahan dalam hal proses pelayanan perizinan, fasilitasi dan persiapan lahan sesuai rencana peruntukan dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah.
- 4) Izin penggunaan lahan untuk penanaman modal tetap mengacu pada ketentuan perundangan-undangan sesuai dengan jenis usaha.

Keringanan Pajak dan Retribusi Daerah

- 1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan keringanan pajak dan retribusi daerah untuk jangka waktu tertentu bagi penanam modal yang telah melaksanakan realisasi penanaman modalnya.
- 2) Keringanan pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- 3) Tata cara pemberian keringanan pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal

- 1) Pemerintah Daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal di daerah.
- 2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
- 3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah didasarkan pada kriteria

eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

- 4) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah provinsi.
- 5) Pemerintah Daerah wajib melindungi hak-hak keperdataan pihak penanam modal yang telah menanamkan modalnya di daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

2.2. Potensi Ekonomi Kabupaten Tapin

Potensi ekonomi Kabupaten Tapin dapat dilihat menggunakan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), laju pertumbuhan ekonomi, sektor basis dan unggulan di Kabupaten Tapin.

2.2.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tapin

Pembangunan ekonomi akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi terkait sangat erat hubungannya dengan masing-masing sektor yang membentuknya. Hal ini berkaitan erat dengan kontribusi masing-masing sektor yang berpotensi besar maupun sektor-sektor yang masih perlu mendapat perhatian lebih untuk dijadikan prioritas pengembangan sehingga diharapkan dapat menjadi sektor yang mempunyai peranan lebih besar dimasa yang akan datang.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tapin selama kurun waktu dari tahun 2017 – 2021 mengalami fluktuasi dan cenderung memiliki tren menurun. Penurunan dimulai dari tahun 2017 sampai tahun 2020 yang diakibatkan adanya pandemic COVID-19 yang cukup membawa pengaruh negatif pada perekonomian di Kabupaten Tapin. Namun, di tahun 2021, perekonomian Kabupaten Tapin mampu bangkit

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tapin (Juta Rupiah) Tahun 2017-2021

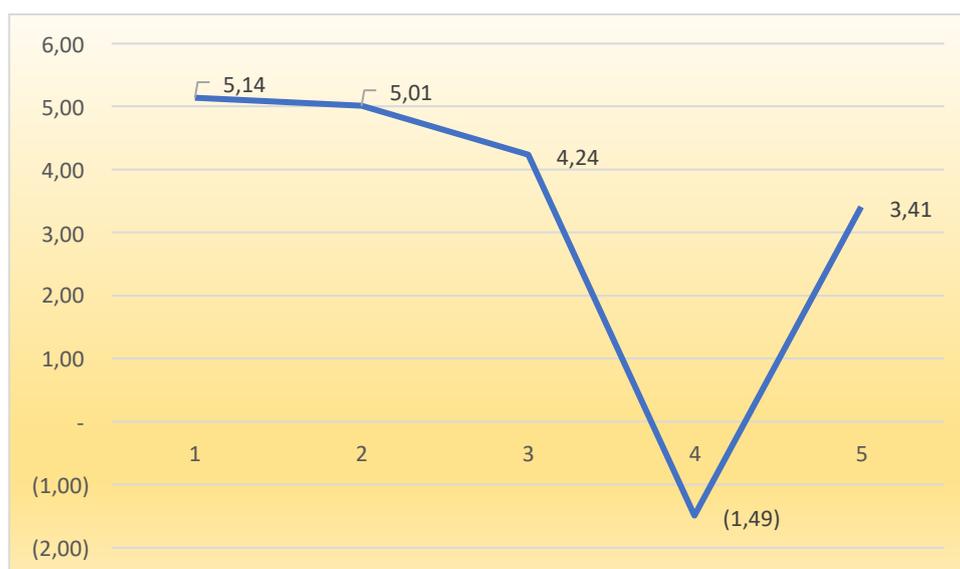
No	Sektor	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tapin (Juta Rupiah)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.625.549	1.642.877	1.777.384	1.716.187	1.712.990
2	Pertambangan dan Penggalian	2.066.275	2.289.034	2.293.864	2.236.351	2.574.050
3	Industri Pengolahan	522.240	545.986	574.864	558.470	617.206
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6.842	7.868	8.439	9.060	9.695
5	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, Limbah dan Daur Ulang	23.413	25.813	27.259	27.276	28.411
6	Konstruksi	420.320	456.464	491.503	491.167	529.368
7	Perdagangan Besar dan Eceran	732.860	813.698	892.401	906.925	961.508
8	Transportasi dan Pergudangan	237.333	260.082	278.940	278.297	294.748
9	Penyediaan akomodasi dan Makanan Minuman	171.360	188.922	201.221	204.947	222.952
10	Informasi dan Komunikasi	263.652	290.078	312.177	333.832	360.474
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	85.133	94.392	103.729	109.509	114.613
12	Real Estate	104.308	112.720	120.230	126.641	134.475
13	Jasa Perusahaan	8.626	9.304	10.143	10.153	10.994
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial Wajib	572.362	617.208	660.837	678.399	709.610
15	Jasa Pendidikan	383.557	419.091	445.697	456.451	490.034
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	136.517	148.077	158.680	167.428	190.395
17	Jasa Lainnya	70.461	77.547	80.879	82.799	85.804
PDRB TAPIN		7.430.808	7.999.159	8.438.249	8.393.891	9.047.327

Sumber: BPS Kabupaten Tapin, 2022

Lapangan usaha pertambangan dan penggalian merupakan penyumbang terbesar bagi perekonomian berupa PDRB di Kabupaten Tapin, diikuti oleh lapangan usaha pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan, serta di posisi ketiga adalah lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Ketiga lapangan usaha tersebut selalu konsisten dalam menempati posisi tiga besar penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Tapin. Selain itu, ada pula tiga lapangan usaha dengan kontribusi paling kecil terhadap PDRB Kabupaten Tapin yaitu lapangan usaha pengadaan listrik dan gas, lapangan usaha jasa perusahaan, dan lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang

2.2.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapin Tahun 2017-2021

Selama lima tahun terakhir dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, laju pertumbuhan PDRB cenderung memiliki tren menurun. Penurunan laju pertumbuhan dimulai dari tahun 2017 sampai mencapai angka minus di tahun 2020 yang diakibatkan adanya pandemic COVID-19 yang cukup membawa pengaruh negatif pada perekonomian di Kabupaten Tapin. Namun, di tahun 2021, perekonomian Kabupaten Tapin mampu bangkit Kembali dari keterpurukan di tahun sebelumnya.



Gambar 4. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapin Tahun 2017-2021

Adapun tiga besar lapangan usaha dengan laju pertumbuhan PDRB paling tinggi di tahun 2021 adalah lapangan usaha jasa Kesehatan dan kegiatan sosial, informasi dan komunikasi, dan pertambangan dan penggalian.

Tabel 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Tapin Tahun 2017-2021

No	Sektor	Pertumbuhan Ekonomi (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,50	(0,43)	5,36	(4,34)	(1,57)
2	Pertambangan dan Penggalian	5,78	6,82	3,00	(2,04)	5,82
3	Industri Pengolahan	3,22	3,92	4,29	(4,29)	4,37
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,33	7,41	4,14	4,38	4,27
5	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,65	6,77	2,15	(0,33)	3,48
6	Konstruksi	4,91	5,75	4,73	(0,68)	2,40
7	Perdagangan Besar dan Eceran	6,49	7,84	6,38	(0,23)	1,27
8	Transportasi dan Pergudangan	3,55	7,31	4,89	(1,60)	4,68
9	Penyediaan akomodasi dan Makanan Minuman	5,21	6,85	2,93	(0,87)	5,62
10	Informasi dan Komunikasi	3,75	6,99	4,52	7,42	7,32
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,18	6,29	6,05	5,85	(1,34)
12	Real Estate	3,14	5,17	3,68	2,97	3,09
13	Jasa Perusahaan	1,56	3,84	4,81	(2,64)	5,54
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial Wajib	2,20	3,78	4,81	0,96	3,21
15	Jasa Pendidikan	6,53	6,96	3,98	(0,38)	4,59
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,41	7,66	3,66	2,11	9,13
17	Jasa Lainnya	5,36	7,25	1,64	(0,68)	1,30
Pertumbuhan Ekonomi		5,14	5,01	4,24	(1,49)	3,41

Sumber: BPS Kabupaten Tapin, 2022

Berdasarkan data diatas, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 mulai membaik meski masih ada sector yang masih terkoreksi minus seperti sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan sektor Jasa Keuangan dan Asuransi. Sedangkan menurut pengeluaran, jenis pengeluaran konsumsi pemerintah memiliki laju pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu sebesar 5,58 persen. Mengingat bahwa untuk menekan angka penyebaran kasus COVID-19, peran pemerintah sangat dibutuhkan.

2.2.3. Struktur Ekonomi Kabupaten Tapin

Struktur ekonominya dengan nilai PDRB yang semakin besar setiap tahunnya di Kabupaten Tapin menunjukkan bahwa nilai share masing-masing kategori penyusun berkembang secara positif. Namun demikian nilai share kategori tertentu bisa saja berkembang negatif tergantung dari pengaruh komponen penyusun kategori tersebut. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Struktur Ekonomi Kabupaten Tapin Tahun 2017-2021

No	Sektor	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	21,88	20,54	21,06	20,45	18,93
2	Pertambangan dan Penggalian	27,81	28,62	27,18	26,64	28,45
3	Industri Pengolahan	7,03	6,83	6,81	6,65	6,82
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,10	0,10	0,11	0,11
5	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31
6	Konstruksi	5,66	5,71	5,82	5,85	5,85
7	Perdagangan Besar dan Eceran	9,86	10,17	10,58	10,80	10,63
8	Transportasi dan Pergudangan	3,19	3,25	3,31	3,32	3,26
9	Penyediaan akomodasi dan Makanan Minuman	2,31	2,36	2,38	2,44	2,46
10	Informasi dan Komunikasi	3,55	3,63	3,70	3,98	3,98
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,15	1,18	1,23	1,30	1,27
12	Real Estate	1,40	1,41	1,42	1,51	1,49
13	Jasa Perusahaan	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial Wajib	7,70	7,72	7,83	8,08	7,84
15	Jasa Pendidikan	5,16	5,24	5,28	5,44	5,42
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,84	1,85	1,88	1,99	2,10
17	Jasa Lainnya	0,95	0,97	0,96	0,99	0,95
PDRB TAPIN		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Tapin, 2022

Struktur ekonomi di Kabupaten Tapin selama kurun waktu lima tahun di dominasi oleh sektor pertambangan dan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mencapai rata 27% dan 20%. Artinya corak atau karakteristik ekonomi di Kabupaten Tapin adalah daerah pertambangan dan daerah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Kontribusi sektor yang paling kecil adalah sektor pengadaan Listrik dan gas dan sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang.

2.2.4. Sektor Unggulan Kabupaten Tapin

Analisis LQ memiliki kelebihan antara lain merupakan alat analisis sederhana yang dapat menunjukkan struktur perekonomian suatu daerah dan sektor substitusi impor potensial atau produk-produk yang bisa dikembangkan untuk ekspor dan menunjukkan sektor potensial (sektoral) untuk dianalisis lebih lanjut. Sedangkan kelemahannya antara lain merupakan indikator kasar yang deskriptif, merupakan kesimpulan sementara dan tidak memperhatikan struktur ekonomi setiap daerah.

Satuan yang dapat digunakan untuk menghasilkan koefisien dapat menggunakan satuan jumlah buruh, atau hasil produksi atau satuan lain yang dapat digunakan sebagai kriteria (Warpani, 2001). Apabila hasil perhitungannya menunjukkan $LQ > 1$, berarti merupakan sektor basis dan berpotensi untuk ekspor, sedangkan $LQ < 1$, berarti bukan sektor basis (sektor lokal/impor). Teknik ini memiliki asumsi bahwa semua penduduk di suatu daerah mempunyai pola permintaan yang sama dengan pola permintaan nasional (regional). Bahwa produktivitas tiap pekerja di setiap sektor industri di daerah adalah sama dengan produktivitas pekerja dalam industri nasional. Setiap industri menghasilkan barang yang homogen pada setiap sektor dan bahwa perekonomian bangsa yang bersangkutan adalah suatu perekonomian tertutup.

Pembahasan mengenai model basis ekonomi diarahkan untuk memahami bagaimana suatu wilayah sebagai bagian dari suatu wilayah yang lain dapat terbentuk, dan berbagai aktivitas yang menyertai dari pembentukan dan pengisian kabupaten. Analisis ini dapat juga dijadikan sebagai landasan bagi analisis pengembangan potensi sektor ekonomi di suatu wilayah.

Analisis LQ pada Kabupaten Tapin diterapkan dengan membandingkan aktivitas perekonomian (PDRB) Tapin dengan aktivitas perekonomian (PDRB)

Provinsi Kalimantan Selatan. Tabel berikut merupakan hasil perhitungan besaran nilai LQ per sektor dalam perekonomian Tapin tahun 2017 sampai dengan 2021.

Tabel 4. Perhitungan besaran nilai LQ per sektor Kabupaten Tapin tahun 2017 sampai dengan 2021

No	Sektor	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,39	1,50	1,44	1,47	1,42	1,36
2	Pertambangan dan Penggalian	1,32	1,34	1,39	1,43	1,46	1,47
3	Industri Pengolahan	0,49	0,49	0,49	0,50	0,49	0,49
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,72	0,71	0,71	0,71	0,70	0,70
5	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,79	0,78	0,78	0,77	0,72	0,71
6	Konstruksi	0,74	0,73	0,72	0,71	0,71	0,72
7	Perdagangan Besar dan Eceran	1,02	1,01	1,01	1,00	1,03	1,03
8	Transportasi dan Pergudangan	0,50	0,49	0,49	0,48	0,50	0,52
9	Penyediaan akomodasi dan Makanan Minuman	1,16	1,17	1,17	1,12	1,14	1,18
10	Informasi dan Komunikasi	1,05	1,02	1,03	1,02	1,01	1,01
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,32	0,32	0,33	0,34	0,36	0,35
12	Real Estate	0,64	0,63	0,64	0,62	0,62	0,61
13	Jasa Perusahaan	0,19	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial Wajib	1,28	1,29	1,30	1,27	1,27	1,29
15	Jasa Pendidikan	1,11	1,13	1,12	1,08	1,07	1,10
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,94	0,95	0,94	0,94	0,90	0,89
17	Jasa Lainnya	0,77	0,78	0,77	0,73	0,74	0,74
PDRB TAPIN (LQ)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Sumber: BPS Tapin, 2018 (diolah)

Keterangan:

LQ > 1 : Sektor Basis

LQ < 1 : Bukan Sektor Basis/Kecenderungan Impor

LQ = 1 : Cukup untuk Memenuhi Kebutuhan Wilayah itu Sendiri

Tabel di atas terlihat nilai LQ-nya sektor dapat ditunjukkan bahwa Kabupaten Tapin memiliki banyak sektor yang bisa menjadi andalan (basis). Perhitungan besaran nilai LQ ini membandingkan PDRB per sektor Kabupaten Tapin dengan Provinsi Kalimantan Selatan. Sektor yang bisa menjadi andalan (Basis) jika memiliki nilai di atas 1 (satu) dan sektor yang memiliki nilai di bawah 1 yang bukan merupakan sektor andalan (basis). Dengan demikian sektor andalan (basis) primer

untuk dapat dikembangkan adalah 1) Pertambangan dan Penggalian, 2) Sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan, 3) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial Wajib, 4) Penyediaan akomodasi dan Makanan Minuman, 5) Jasa Pendidikan, 6) Perdagangan Besar dan Eceran, 7) Informasi dan Komunikasi.

2.2.5. Analisis Shift Share

Analisis Shift Share digunakan untuk mengetahui perubahan struktur/kinerja ekonomi daerah terhadap struktur ekonomi yang lebih tinggi (kabupaten atau provinsi) sebagai referensi. Perubahan relatif kinerja pembangunan daerah terhadap Provinsi dapat dilihat dari:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional (*national growth effect*), bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi regional terhadap daerah.
2. Pergeseran proporsi (*proportional shift*), mengukur perubahan relatif (naik/turun) suatu sektor daerah terhadap sektor yang sama di tingkat regional, disebut juga pengaruh bauran industri/industry mix.
3. Pergeseran diferensial (*differential shift*), mengetahui seberapa kompetitif sektor tertentu daerah dibanding regional. Jika nilainya (+) berarti kompetitif, (-) tidak kompetitif, disebut juga pengaruh kompetitif.

Pertumbuhan ekonomi telah mengakibatkan perubahan struktur perekonomian. Transformasi struktural merupakan proses perubahan struktur perekonomian dari sektor primer ke sektor sekunder. Perubahan struktur atau transformasi ekonomi dari tradisional menjadi modern secara umum dapat dilihat sebagai suatu perubahan yang berkaitan dengan komposisi pergeseran penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap PDRB suatu wilayah. Analisis Shift Share adalah analisis yang bertujuan untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah dengan membandingkannya dengan daerah yang lebih besar (regional atau nasional).

Teknik analisis shift share ini membagi pertumbuhan sebagai perubahan (D) suatu variabel wilayah, seperti tenaga kerja, nilai tambah, pendapatan atau output, selama kurun waktu tertentu menjadi pengaruh-pengaruh: pertumbuhan nasional (N), industri mix/bauran industri (M), dan keunggulan kompetitif (C).

Persamaan Shift Share
$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$$

Keterangan:

- i : sektor-sektor ekonomi yang diteliti
- j : variabel wilayah yang diteliti di Kabupaten Tapin
- n : variabel wilayah Indonesia
- D_{ij} : perubahan sektor i di daerah j di Kabupaten Tapin
- N_{ij} : pertumbuhan nasional sektor i di daerah j di Kabupaten Tapin
- M_{ij} : bauran industri sektor i di daerah j di Kabupaten Tapin
- C_{ij} : keunggulan kompetitif sektor i di daerah j di Kabupaten Tapin

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah PDRB yang dinotasikan sebagai (y). maka:

$$D_{ij} = y^*_{ij} - y_{ij}$$

$$N_{ij} = y_{ij} \cdot r_n$$

$$M_{ij} = y_{ij} (r_{in} - r_n)$$

$$C_{ij} = y_{ij} (r_{ij} - r_{in})$$

Keterangan:

- y_{ij} : PDRB sektor i di daerah j (Kabupaten Tapin)
- y^*_{ij} : PDRB sektor i di daerah j akhir tahun analisis (Kabupaten Tapin)
- r_{ij} : laju pertumbuhan sektor i di daerah j (Kabupaten Tapin)
- r_{in} : laju pertumbuhan sektor i di daerah n (Provinsi Kalimantan Selatan)
- r_n : rata-rata laju pertumbuhan tenaga kerja/GNP di daerah n (Provinsi Kalimantan Selatan)

$$r_{ij} = \frac{(y^*_{ij} - y_{ij})}{y_{ij}}$$

$$r_{in} = \frac{(y^*_{in} - y_{in})}{y_{in}}$$

$$r_n = \frac{(y^*_n - y_n)}{y_n}$$

Keterangan:

- y_{in} : GNP sektor i di daerah n (Provinsi Kalimantan Selatan)
- y^*_{in} : GNP sektor i di daerah n akhir tahun analisis (Provinsi Kalimantan Selatan)
- y_n : total GNP semua sektor di daerah n (Provinsi Kalimantan Selatan)
- y^*_n : total GNP semua sektor di daerah n (Provinsi Kalimantan Selatan) akhir tahun analisis

Untuk suatu daerah, pertumbuhan kabupaten, bauran industri dan keunggulan kompetitif dapat dijumlahkan untuk semua sektor sebagai keseluruhan daerah, sehingga persamaan shift share untuk sektor i di wilayah j adalah:

$$D_{ij} = y_{ij} \cdot r_n + y_{ij}(r_{in} - r_n) + y_{ij}(r_{ij} - r_{in})$$

Tabel 5. Shift Share Sektor Kab. Tapin Tahun 2017-2021

No	Sektor/Industri	Komponen Pertumbuhan (Nij)	Komponen Bauran Industri (Mij)	Komponen Keunggulan Kompetitif (Cij)	PDRB (Dij)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	34.197.886	(8.544.741)	(16.908.967)	8.744.178
2	Pertambangan dan Penggalian	43.469.778	(17.346.875)	24.654.633	50.777.535
3	Industri Pengolahan	10.986.746	(2.085.989)	595.913	9.496.670
4	Pengadaan Listrik dan Gas	143.946	147.494	(6.125)	285.315
5	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, Limbah dan Daur Ulang	492.563	269.722	(262.488)	499.797
6	Konstruksi	8.842.584	2.513.705	(451.494)	10.904.795
7	Perdagangan Besar dan Eceran	15.417.731	5.007.554	2.439.476	22.864.762
8	Transportasi dan Pergudangan	4.992.950	(929.294)	1.677.860	5.741.516
9	Penyediaan akomodasi dan Makanan Minuman	3.605.021	1.097.701	456.505	5.159.226
10	Informasi dan Komunikasi	5.546.641	4.222.190	(86.634)	9.682.198
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.791.013	(18.018)	1.175.022	2.948.018
12	Real Estate	2.194.415	1.188.114	(365.907)	3.016.622
13	Jasa Perusahaan	181.473	85.350	(30.038)	236.785
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12.041.213	1.456.557	226.999	13.724.769
15	Jasa Pendidikan	8.069.171	3.447.980	(869.446)	10.647.706
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.872.007	3.620.714	(1.104.936)	5.387.785
17	Jasa Lainnya	1.482.346	391.831	(339.874)	1.534.303
	Total	156.327.485	(5.476.005)	10.800.500	161.651.980

Sumber: BPS Tapin, 2022 (diolah)

a) Komponen Pertumbuhan (Nij)

Pertumbuhan ekonomi Propinsi Kalimantan Selatan telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin sebesar 156.327.485 (juta rupiah). Namun, sebenarnya perkembangan PDRB Kabupaten Tapin hanya sebesar 161.651.980 (juta rupiah). Hal ini dikarenakan masih ada dua komponen lain yang memberikan pengaruh yaitu bauran industri dan keunggulan

kompetitif.

Tiga penyumbang terbesar adalah sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 43.469.778 juta rupiah, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 34.197.886 juta rupiah, sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 15.417.731 juta rupiah. Semua sektor menunjukkan pertumbuhan positif yang berarti pertumbuhan PDRB Kabupaten Tapin lebih cepat dibandingkan PDRB Propinsi Kalimantan Selatan.

b) Komponen Bauran Industri (*Mij*)

Komponen bauran industri (*Mij*) menyatakan besar perubahan perekonomian wilayah akibat adanya bauran industri. Hasil analisis menunjukkan bahwa bauran industri akan meningkatkan perkembangan perekonomian Kabupaten Tapin. Akan tetapi, Nilai negatif mengindikasikan bahwa komposisi sektor pada PDRB Kabupaten Tapin cenderung mengarah pada perekonomian yang akan tumbuh lebih lambat dari provinsi Kalimantan Selatan -5.476.005 juta rupiah.

Sektor terbesar yang mendapat pengaruh bauran industri (nilai positif), yaitu sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 5.007.554 juta rupiah, sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 4.222.190 juta rupiah, dan sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 3.620.714 juta rupiah. Sektor-sektor tersebut mempunyai tingkat daya pertumbuhan cepat dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan.

c) Komponen Keunggulan Kompetitif (*Cij*)

Nilai keunggulan kompetitif yaitu 10.800.500 juta rupiah. Secara agregat nilai positif ini mengindikasikan bahwa perekonomian Kabupaten Tapin memiliki keunggulan kompetitif yang tinggi bila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan. Keunggulan kompetitif yang dihasilkan akan mempengaruhi perkembangan perekonomian Kabupaten Tapin.

Selanjutnya Analisis Model Shift-Share Pendekatan Proportional Shift (PS) dan Differential Shift (DS) untuk menentukan skala tipologi pengembangan sector di Kabupaten Tapin disajikan pada table berikut.

Tabel 6. Analisis Model *Shift-Share* Pendekatan *Proportional Shift (PS)* dan *Differential Shift (DS)* Kabupaten Tapin

No	Sektor	DS (Cij)	PS (Mij)	Tipologi	Keterangan
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	(16.908.967)	(8.544.741)	IV	Pertumbuhan Terhambat, Tidak Berkembang
2	Pertambangan dan Penggalian	24.654.633	(17.346.875)	III	Kecepatan Pertumbuhan Terhambat, Cenderung Berpotensi
3	Industri Pengolahan	595.913	(2.085.989)	III	Kecepatan Pertumbuhan Terhambat, Cenderung Berpotensi
4	Pengadaan Listrik dan Gas	(6.125)	147.494	II	Pertumbuhan Terhambat Tapi Berkembang
5	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, Limbah dan Daur Ulang	(262.488)	269.722	II	Pertumbuhan Terhambat Tapi Berkembang
6	Konstruksi	(451.494)	2.513.705	II	Pertumbuhan Terhambat Tapi Berkembang
7	Perdagangan Besar dan Eceran	2.439.476	5.007.554	I	Pertumbuhan Sangat Pesat
8	Transportasi dan Pergudangan	1.677.860	(929.294)	III	Kecepatan Pertumbuhan Terhambat, Cenderung Berpotensi
9	Penyediaan akomodasi dan Makanan Minuman	456.505	1.097.701	I	Pertumbuhan Sangat Pesat
10	Informasi dan Komunikasi	(86.634)	4.222.190	II	Pertumbuhan Terhambat Tapi Berkembang
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.175.022	(18.018)	III	Kecepatan Pertumbuhan Terhambat, Cenderung Berpotensi
12	Real Estate	(365.907)	1.188.114	II	Pertumbuhan Terhambat Tapi Berkembang
13	Jasa Perusahaan	(30.038)	85.350	II	Pertumbuhan Terhambat Tapi Berkembang
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial Wajib	226.999	1.456.557	I	Pertumbuhan Sangat Pesat
15	Jasa Pendidikan	(869.446)	3.447.980	II	Pertumbuhan Terhambat Tapi Berkembang
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	(1.104.936)	3.620.714	II	Pertumbuhan Terhambat Tapi Berkembang
17	Jasa Lainnya	(339.874)	391.831	II	Pertumbuhan Terhambat Tapi Berkembang
	Total	10.800.500	(5.476.005)	III	Kecepatan Pertumbuhan Terhambat, Cenderung Berpotensi

Sumber: BPS Tapin, 2022 (diolah)



Berdasarkan data diatas secara keseluruhan ekonomi Kabupaten Tapin masuk pada tipologi III yaitu Kecepatan Pertumbuhan Terhambat, Cenderung Berpotensi. Sektor unggulan dipastikan memiliki potensi lebih besar untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor lainnya dalam suatu daerah terutama adanya faktor pendukung terhadap sektor unggulan tersebut yaitu akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja yang terserap, dan kemajuan teknologi (technological progress). Penciptaan peluang investasi juga dapat dilakukan dengan memberdayakan potensi sektor unggulan yang dimiliki oleh daerah. Keunggulan komperatif bagi suatu komoditi bagi suatu daerah adalah bahwa komoditi itu lebih unggul secara relatif dengan komoditi lain di daerahnya. Pengertian unggul dalam hal ini adalah dalam bentuk perbandingan dan bukan dalam bentuk nilai tambah riil. Keunggulan komperatif adalah suatu kegiatan ekonomi yang secara perbandingan lebih menguntungkan bagi pengembangan daerah. Sedangkan sektor unggulan adalah sektor yang memiliki keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif dengan produk sektor sejenis dari daerah lain serta memberikan nilai manfaat yang besar. Sektor unggulan juga memberikan nilai tambah dan produksi yang besar, memiliki multiplier effect yang besar terhadap perekonomian lain, serta memiliki permintaan yang tinggi baik pasar lokal maupun pasar ekspor.

BAB III

KEBIJAKAN PEMBERIAN INSENTIF DAN FASILITASI KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

3.1. Pola Umum Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

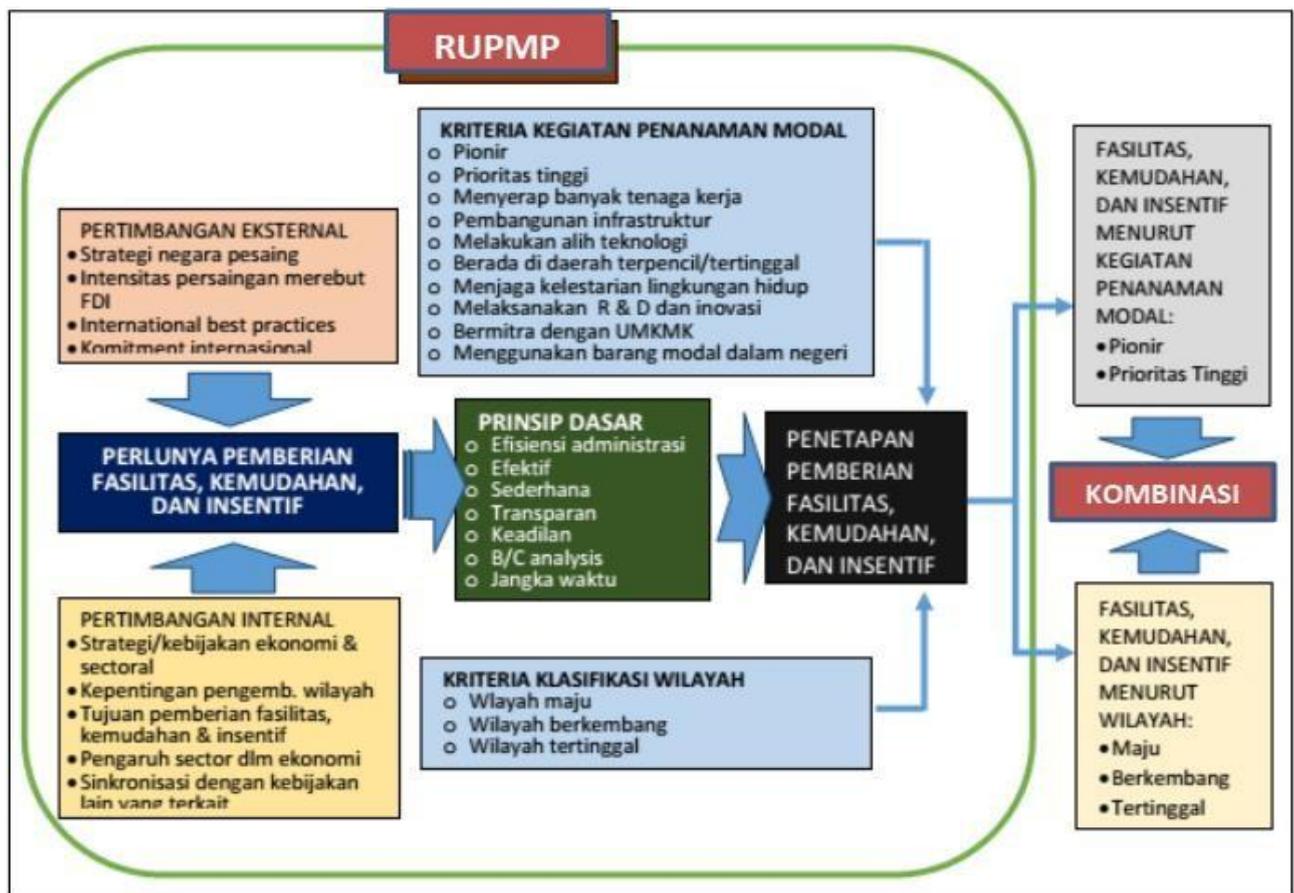
Penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan Kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, melalui perbaikan koordinasi antara instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serat iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku atau melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah.

Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal. Pertimbangan eksternal meliputi strategi negara pesaing; intensitas persaingan merebut penanaman modal dari luar negeri (foreign direct investment); praktek terbaik secara internasional (international best practices); serta komitmen internasional. Sedangkan

pertimbangan internal yang perlu diperhatikan diantaranya: strategi/kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral; kepentingan pengembangan wilayah; tujuan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lainnya, besarnya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja; sinkronisasi dengan kebijakan terkait; serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Adapun prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal adalah efisiensi administrasi, efektif, sederhana, transparan, keadilan, perhitungan dampak ekonomi (analisis keuntungan dan kerugian), serta adanya jangka waktu dan/atau adanya peraturan kebijakan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dari pemerintah pusat. Pola umum pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal pada gambar berikut:



Sumber: Perka BKPM No. 9 Tahun 2012

Gambar 5. Pola Umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Penetapan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan bidang usaha antara lain: kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir, kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi, kegiatan penanaman modal yang menyerap banyak tenaga kerja, kegiatan penanaman modal yang melakukan pembangunan infrastruktur, kegiatan penanaman modal yang melakukan alih teknologi, kegiatan penanaman modal yang berada di daerah terpencil, kegiatan penanaman modal yang menjaga kelestarian lingkungan hidup, kegiatan penanaman modal yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi, kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan UMKMK, serta kegiatan penanaman modal yang penggunaan barang modal dalam negeri.

Berdasarkan pertimbangan eksternal dan internal, prinsip dasar pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal, kriteria kegiatan penanaman modal, serta kriteria klasifikasi wilayah maka ditetapkan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif. Dengan demikian, pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal ditetapkan berdasarkan pertimbangan pengembangan sektoral, wilayah, atau kombinasi antara pengembangan sektoral dan wilayah. Adapun yang dimaksud dengan kegiatan penanaman modal yang melakukan industry pionir adalah penanaman modal yang:

- Memiliki keterkaitan luas,
- Memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi,
- Memperkenalkan teknologi baru, serta
- Memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Sedangkan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi adalah penanaman modal yang:

- Mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi,
- Memperkuat struktur industri nasional

- Memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar internasional, dan
- Memiliki keterkaitan dengan pengembangan penanaman modal strategis di bidang pangan, infrastruktur dan energi.

Kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka kepentingan nasional dan perkembangan ekonomi.

3.2. Pengaruh Kebijakan Insentif

Investasi yang berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini berarti bahwa investasi yang tinggi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan selanjutnya meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Tingkat pengangguran bisa direduksi, pendapatan masyarakat meningkat dan kesejahteraan masyarakatpun meningkat. Investasi juga memungkinkan terjadinya transfer teknologi dan pengetahuan (*knowledge*) dari negara maju ke negara berkembang.

Pemberian Bentuk Insentif dan kemudahan Penanaman Modal di setiap kota masih minim, karena hanya memberikan dua kriteria yaitu, berdasarkan nilai investasi dan jumlah tenaga kerja lokal yang diserap, hal ini mempengaruhi minat para investor untuk menanamkan modalnya di suatu kota, sehingga tujuan dari pemberian insentif dan kemudahan yang untuk meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya di suatu kota belum tercapai secara maksimal.

Investor domestik maupun investor asing yang menanamkan investasi di Indonesia pada dasarnya diberikan berbagai kemudahan. Pemberian kemudahan ini dimaksudkan agar investor asing mau menanamkan investasinya di Indonesia. Fasilitas penanaman modal diberikan dengan pertimbangan tingkat daya saing perekonomian dan kondisi keuangan negara dan harus promotif dibandingkan fasilitas yang diberikan negara lain. Pentingnya kepastian fasilitas penanaman modal ini mendorong pengaturan secara lebih detail terhadap bentuk fasilitas

fiskal, fasilitas hak atas tanah, fasilitas imigrasi, dan fasilitas perizinan impor.

Tujuan pemberian fasilitas-fasilitas yang bersifat insentif sebagai berikut:

1. Mempercepat penyebaran investasi ke seluruh pelosok tanah air, karena dengan adanya investasi terjadi pertumbuhan ekonomi, dengan adanya pertumbuhan, akan ada peningkatan penanaman modal.
2. Insentif atau fasilitas diberikan supaya ada percepatan dari sektor ekonomi. Perekonomian pasti tumbuh kalau sektor-sektor dibawahnya bekerja dengan baik, termasuk sisi sektor produksi, yaitu industri. berarti harus ada sector-sektor yang dipacu. Pengaturan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal diatur dalam Undang Undang Penanaman Modal bahwa pemberian fasilitas hanya dapat diberikan kepada:
 - Penanaman modal yang melakukan perluasan usaha; atau
 - Penanaman modal yang melakukan penanaman modal baru.

3.2 Pengaruh Kebijakan Kemudahan Investasi

Negara membutuhkan modal untuk membiayai proyek pembangunannya. Apabila ternyata persediaan tabungan di dalam negeri tidak tercukupi, maka salah satu cara untuk mendapatkan suntikan modal adalah dengan menarik investasi asing langsung (*Investment /FDI*). Kebijakan nasional merupakan kunci daya tarik investasi asing langsung. Dalam beberapa dekade terakhir banyak negara mulai melakukan liberalisasi terutama yang berkaitan dengan kebijakan investasi asing langsung. Dalam hal tertentu, investasi asing langsung hanyalah pelengkap investasi domestik. Namun, dalam perkembangannya investasi asing langsung memiliki peranan penting dalam investasi secara keseluruhan.

Pertumbuhan investasi asing di Indonesia sejak tahun sampai dengan tahun 2010 terlihat adanya *trend* peningkatan arus investasi asing yang disetujui. Kondisi ini tidak terlepas dari sejumlah insentif peraturan pemerintah yang diberikan untuk menarik investor ke Indonesia seperti paket kebijakan insentif fiskal dan

kebijakan insentif perpajakan untuk mendukung peningkatan investasi permanen (Depkeu, 2011).

Nilai ekonomi suatu investasi selain dilihat dari penambahan output, juga harus dilihat dari jumlah tenaga kerja yang mampu diserap, karena program investasi bukan hanya dimaksudkan untuk pertumbuhan ekonomi semata tetapi juga untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Berbagai studi telah dilakukan untuk melihat dampak Investasi pada penyerapan tenaga kerja antara lain Greenaway, Morgan dan Wright (2002) yang menunjukkan adanya dampak positif investasi asing di negara berkembang, antara lain pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Selain itu, investasi langsung dari modal asing membuka lapangan kerja baru bagi para penganggur di negara-negaraberkembang.

3.3. Kendala Implementasi Kebijakan Insentif dan Kemudahan Investasi

Kajian yang sudah dilakukan oleh UNCTAD pada tahun 2006 menempatkan Indonesia sebagai daerah yang kurang diminati karena nilai *location intensity* kurang dari 5. Indonesia belum menjadiprioritas sebagai tempat untuk menginvestasikan modal para investor luar negeri. Selain itu kinerja dan potensi arus masuk investor asing juga masuk dalam kategori rendah. Banyaknya hambatan masuk bagi investor asing, birokrasi yang kurang efisien dan infrastruktur yang kurang mendukung menjadi beberapa alasan mengapa Indonesia kurang diminati oleh investor asing. Oleh karena itu penurunan PMA di Indonesia perlu dicermatisebagai peringatan (*warning*) bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan kebijakan sektor ini guna mendorong peningkatan perekonomian yang lebih baik. Bagaimanapun juga kebijakan investasi akan terkait langsung dengan kebijakan industri, perdagangan, dan juga kebijakan non ekonomi lainnya.

Persaingan yang semakin ketat di antara negara-negara di dunia untuk menarik FDI mendorong setiap negara termasuk Indonesia untuk lebih

meningkatkan iklim investasi melalui *policy framework* yang lebih komprehensif dan sesuai dengan tuntutan investor. Hal ini harus didukung oleh *economic determinant* dan *non economic determinant* yang lebih kondusif. Harus dipahami bahwa sesungguhnya investor asing (*fund manager*) sudah memahami kondisi dan karakteristik suatu negara, sehingga kebijakan apapun yang digulirkan oleh satu negara akan terpantau oleh investor. Saat ini yang terjadi adalah penolakan oleh investor yang semakin tinggi yang disebabkan oleh banyak factor, baik ekonomi maupun non ekonomi.

3.4. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Investasi

Faktor yang mempengaruhi investasi dapat dibagi dalam 2 bagian (Harjono, 2013), yaitu faktor di dalam negeri (Internal) dan di luar negeri (Eksternal).

a) Faktor Internal

Faktor internal yang mempengaruhi investasi, antara lain adalah:

- 1) Stabilitas politik dan perekonomian;
- 2) Kebijakan dan langkah-langkah deregulasi dan debirokratisasi yang secara terus-menerus telah diambil oleh pemerintah dalam rangka pengkairahan iklim investasi, dengan langkah-langkah tersebut berbagai bidang usaha dalam rangka penanaman modal menjadi lebih terbuka. Pembangunan kawasan industri, prasarana seperti jalan, telepon serta listrik yang saat ini dapat ditangani oleh swasta, diperkirakan akan lebih siap untuk dapat menunjang pelaksanaan investasi;
- 3) Diberikannya fasilitas perpajakan khusus untuk daerah tertentu, seperti penundaan pajak pertambahan nilai di Indonesia Bagian Timur yang akan semakin merangsang bagi para investor untuk menanamkan modalnya di daerah yang belum begitu berkembang;
- 4) Tersedianya sumber daya alam yang berlimpah seperti minyak bumi, gas, bahan tambang dan hasil hutan maupun iklim dan letak geografis serta

kebudayaan, dan keindahan alam tetap menjadi daya tarik tersendiri yang telah mengakibatkan tumbuhnya proyek-proyek yang bergerak di bidang industri kimia, industri perkayuan, industri kertas dan industri perhotelan (*tourism*), yang sekarang menjadi sektor primadona yang banyak diminati para investor baik dalam rangka PMDN maupun PMA; dan

- 5) Tersedianya sumber daya manusia dengan upah yang kompetitif memberikan pengaruh terhadap peningkatan minat investor pada proyek-proyek yang bersifat padat karya, seperti industri tekstil, industri sepatu dan mainan anak-anak.

b) Faktor Eksternal

Faktor Eksternal yang mempengaruhi investasi, antara lain adalah:

- 1) Apresiasi mata uang dari Negara-negara yang jumlah investasinya di Indonesia cukup tinggi. Adanya apresiasi mata uang negara asal investor terhadap mata uang rupiah, dapat mendorong para investor asing melakukan investasi langsung. Hal tersebut dikarenakan melakukan investasi menjadi sangat murah, karena nilai uang rupiah menjadi sangat kecil dari nilai mata uang negara asal investor.
- 2) Meningkatnya biaya produksi di luar negeri. Dengan meningkatnya biaya produksi di negara asal investor berarti tingkat keuntungan yang diperoleh investor akan semakin menipis. Dengan pertimbangan ingin memperoleh tingkat keuntungan yang besar, maka para investor mulai berfikir untuk mengalihkan usahanya di luar negeri terutama di Negara berkembang yang masih rendah upah tenaga kerjanya dan untuk mendekatkan produk dengan pasar, sehingga bagi perusahaan yang padat karya, dengan upah tenaga kerja yang rendah dan ongkos distribusi rendah akan menghemat biaya produksi.

Berdasarkan kepada hubungan sesuatu industri dengan pasarnya, berbagai



industri dapat dibedakan dalam 3 golongan, yaitu industri yang mendekati ke bahan mentah (*resource oriented industry*), industri yang mendekati kepada pasarnya (*market oriented industry*), dan industri yang letaknya netral terhadap pasar maupun bahan mentah (*foot-loose industry*). Bagi industri yang termasuk dalam golongan pertama yang terutama terdiri dari industri yang memproses bahan pertanian dan hasil industri primer lainnya, menarik tidaknya sesuatu daerah terutama ditentukan apakah di daerah tersebut terdapat bahan mentah yang diperlukannya. Tersedianya bahan mentah dengan harga yang murah telah memberikan dorongan yang besar sekali kepada industri yang bersangkutan untuk mengembangkan usahanya, dan dengan demikian mengurangi perangsang fiskal dan keuangan.

Industri golongan kedua, yang pada umumnya merupakan industri bahan makanan yang tidak tahan lama atau industri jasa-jasa, menarik tidaknya sesuatu daerah terutama tergantung pada apakah daerah tersebut tersedia pasar yang cukup bagi kegiatan industri tersebut, dengan demikian maka perangsang fiskal dan keuangan yang akan diberikan dapat dikurangi. Industri golongan ketiga, yang pada umumnya terdiri dari industri pengolahan (manufakturing) menghadapi persoalan yang sedikit berbeda yaitu efisiensinya tidak tergantung pada tersedianya pasar atau bahan mentah di daerah tersebut. Dalam keadaan demikian industri tersebut mempunyai lebih banyak kebebasan dalam menentukan lokasi dari industrinya dan perangsang yang disediakan mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap keputusan mereka untuk menentukan lokasi dari industrinya.

Faktor-faktor penting lainnya yang akan menentukan menarik tidaknya suatu daerah sebagai lokasi industri adalah *external economies* selain dari prasarana umum seperti fasilitas untuk memperoleh kredit jangka pendek, tersedianya tenaga ahli yang diperlukan, tersedianya perusahaan *service* atau jasa

untuk industri tersebut, tersedianya perumahan bagi para pekerja, dan tersedianya fasilitas rekreasi dan pendidikan untuk para pekerja. Tanpa tersedianya perusahaan jasa, perumahan pekerja, tempat rekreasi dan institusi pendidikan yang memadai, industri-industri terpaksa menyediakan fasilitas tersebut dan mempertinggi jumlah investasi yang perlu mereka keluarkan. Sedangkan kesukaran dalam mendapatkan kredit jangka pendek untuk membiayai pengeluaran rutin terutama akan mengganggu kelancaran jalannya perusahaan. Dan akhirnya ketiadaan tenaga kerja ahli yang mahir menyebabkan industri-industri harus mencari daerah lain dan hal ini akan mempertinggi biaya. Jadi apabila berbagai jenis *external economies* tersebut di atas tidak cukup tersedia pemerintah perlu memperbesar perangsang fiskal dan keuangan yang diberikan untuk mengimbangi kekurangan dari berbagai fasilitas di atas.

3.5. Analisis SWOT Kebijakan Insentif dan Kemudahan Investasi

Identifikasi dan analisis kondisi internal dilakukan melalui pendekatan analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats* (SWOT), dengan melibatkan pemikiran sistematis dan hasil diagnosa menyeluruh dari faktor yang berhubungan kebijakan insentif dan kemudahan perijinan dalam penanaman modal di Kabupaten Tapin. Semua faktor digunakan secara ekstensif di dalam perencanaan strategis untuk analisis pengaruh faktor lingkungan operasional.

Analisis SWOT adalah satu alat dukung yang penting untuk pengambilan keputusan, digunakan untuk meneliti satu lingkungan internal dan eksternal secara sistematis. Analisa SWOT dipergunakan untuk meringkas faktor internal dan eksternal paling penting yang dapat mempengaruhi masa depan investasi yang biasanya dikenal sebagai faktor-faktor strategis.

3.5.1. Identifikasi Faktor Internal

Faktor Internal meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan (*Strengths*), dan Kelemahan (*Weaknesses*).

1) Faktor Kekuatan (*Strengths*)

Merupakan potensi yang sangat unit/potensial berdasarkan faktor ekonomi, dan kebijakan yang berkaitan dengan insentif dan kemudahan perijinan penanaman modal. Faktor kekuatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Faktor alam dan geografis yaitu ketersediaan sumberdaya alam untuk menjadi modal pembangunan dan lokasi yang relatif strategis.
- b) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi sektor basis;
- a) Sektor Pertambangan menjadi sektor basis;
- b) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran menjadi sektor basis;
- c) Faktor peran pemerintah yang relatif lebih kondusif untuk pengembangan investasi daerah;
- d) Sudah memiliki Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Insentif dan kemudahan perijinan penanaman modal.
- e) Kualitas infrastruktur fisik yang relatif lebih baik
- f) Kondisi ekonomi makro terutama potensi daya tarik terhadap investasi asing dan keterbukaan dalam perdagangan dan jasa yang relatif baik.

2) Faktor Kelemahan (*Weakness*)

Permasalahan yang timbul yang akan menjadi penghambat pertumbuhan wilayah, sehingga perkembangan dirasakan kurang terencana dan terkontrol. Adapun faktor kelemahan di Kabupaten Tapin sebagai berikut:

- a) Tingginya ketergantungan pada sektor primer dan kurangnya sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
- b) Rendahnya kualitas sumber daya manusia;

- c) Kondisi finansial, bisnis dan tenaga kerja yang belum optimal untuk menunjang investasi.
- d) Ketidakmerataan investasi karena sebagian besar investasi pada sektor pertambangan.
- e) Kurangnya informasi bagi investor tentang yang insentif (Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah, Retribusi);
- f) Kurangnya informasi bagi investor tentang adanya insentif Pemberian dan stimulan, pemberian modal dan mekanismenya;
- g) Masih terbatasnya Infrastruktur dan sarana prasarana di Kabupaten Tapin;

3.5.2. Identifikasi Faktor Eksternal

Faktor Eksternal meliputi penilaian terhadap faktor peluang (*Opportunities*), dan faktor ancaman (*Threats*).

1) Faktor Peluang (*Opportunities*)

Potensi yang dimiliki suatu wilayah, terutama yang cenderung berorientasi pasar bagi pertumbuhan kawasan dimasa datang, sehingga memberikan peluang optimis dalam pengembangannya maupun dalam menarik minat investor. Adapun faktor peluang adalah sebagai berikut:

- a) Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 10 Tahun 2021 Bidang Usaha Penanaman Modal sebagai kepastian hukum bagi investor;
- b) Penambahan dan peningkatan tenaga kerja (Ketersediaan tenaga kerja dan kualitas tenaga kerja);
- c) Minat investasi yang relatif cukup tinggi dan potensi yang masih dapat digali untuk dimanfaatkan;
- d) Penyediaan lahan industri baru di luar Jawa untuk pemerataan dan mengatasi keterbatasan ekspansi investasi di Pulau Jawa;

- e) Adanya permintaan dan kebijakan untuk hilirisasi industri-industri berbasis sumber daya alam (SDA);
- f) Peningkatan nilai PDRB dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tapin;
- g) Peningkatan nilai PAD Kabupaten Tapin dalam jangka pendek; dan
- h) Keamanan politik dan sosial budaya di Kabupaten Tapin.

2) Faktor Ancaman (*Threats*)

Potensi yang dimiliki, dapat pula menjadi ancaman bagi daerah yang kurang atau belum mampu / belum siap menerima tekanan perkembangan wilayah di sekitarnya, sehingga berakibat kurang menguntungkan dan pada akhirnya keuntungan akan tersedot oleh daerah-daerah disekitarnya yang sudah siap (modal luar). Seperti kebijakan pembangunan dalam era ekonomi daerah, dimana daerah-daerah yang mempunyai sumber daya alam akan mengalami pengembangan yang signifikan, tetapi akan menimbulkan ancaman atau hambatan apabila suatu daerah tidak hati-hati dalam mengelolanya. Adapun hambatan sebagai berikut:

- a) Meningkatnya daya saing daerah di luar Kabupaten Tapin;
- b) Meningkatnya daya saing dari kawasan investasi lain yang lebih menjanjikan di negara-negara tetangga;
- c) Rendahnya produktivitas tenaga kerja (SDM) di Kabupaten Tapin; dan
- d) Degradasi lingkungan akibat eksploitasi berlebihan.
- e) Faktor bencana alam, masalah sosial dan perburuhan yang mungkin kurang efektif ditangani.

Berdasarkan hasil identifikasi dari faktor internal maka disusun pendekatan strategi SWOT untuk menentukan strategi dan arahan kebijakan di Kabupaten Tapin.

Tabel 7. Matriks SWOT Penanaman Modal Kabupaten Tapin

FAKTOR INTERNAL	
Strength/kekuatan (S)	Weakness/kelemahan (W)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor alam dan geografis yaitu ketersediaan sumberdaya alam untuk menjadi modal pembangunan dan lokasi yang relatif strategis. 2. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi sektor basis; 3. Sektor Pertambangan menjadi sektor basis; 4. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran menjadi sektor basis; 5. Faktor peran pemerintah yang relatif lebih kondusif untuk pengembangan investasi daerah; 6. Sudah memiliki Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Insentif dan kemudahan perijinan penanaman modal. 7. Kualitas infrastruktur fisik yang relatif lebih baik 8. Kondisi ekonomi makro terutama potensi daya tarik terhadap investasi asing dan keterbukaan dalam perdagangan dan jasa relatif baik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya ketergantungan pada sektor primer dan kurangnya sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; 2. Rendahnya kualitas sumber daya manusia; 3. Kondisi finansial, bisnis dan tenaga kerja yang belum optimal untuk menunjang investasi. 4. Ketidakmerataan investasi karena sebagian besar investasi pada sektor pertambangan. 5. Kurangnya informasi bagi investor tentang yang insentif (Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah, Retribusi); 6. Kurangnya informasi bagi investor tentang adanya insentif Pemberian dana stimulan, pemberian modal dan mekanismenya; 7. Masih terbatasnya Infrastruktur dan sarana prasarana di Kabupaten Tapin;
FAKTOR EKSTERNAL	
Opportunity/peluang	Threats/ancaman (T)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 10 Tahun 2021 Bidang Usaha Penanaman Modal sebagai kepastian hukum bagi investor; 2. Penambahan dan peningkatan tenaga kerja (Ketersedian tenaga kerja dan kualitas tenaga kerja); 3. Minat investasi yang relatif cukup tinggi dan potensi yang masih dapat digali untuk dimanfaatkan; 4. Penyediaan lahan industri baru di luar Jawa untuk pemerataan dan mengatasi keterbatasan ekspansi investasi di Pulau Jawa; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya daya saing daerah di luar Kabupaten Tapin; 2. Meningkatnya daya saing dari kawasan investasi lain yang lebih menjanjikan di negara-negara tetangga; 3. Rendahnya produktivitas tenaga kerja (SDM) di Kabupaten Tapin; dan 4. Degradasi lingkungan akibat eksploitasi berlebihan. 5. Faktor bencana alam, masalah sosial dan perburuhan yang mungkin kurang efektif ditangani.

<ol style="list-style-type: none"> 5. Adanya permintaan dan kebijakan untuk hilirisasi industri-industri berbasis sumber daya alam (SDA); 6. Peningkatan nilai PDRB dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tapin; 7. Peningkatan nilai PAD Kabupaten Tapin dalam jangka pendek; dan 8. Keamanan politik dan sosial budaya di Kabupaten Tapin. 	
STRATEGI S-O	STRATEGI W-O
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan strategi promosi yang lebih fokus (targeted promotion), terarah dan inovatif 2. Arahan pemberian insentif bagi sektor basis pertambangan sesuai dengan peraturan dan UUD yang berlaku. 3. Arahan pemberian insentif bagi sektor basis industri pengolahan untuk peningkatan jumlah tenaga kerja 4. Arahan investasi bagi sektor pertambangan, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Perdagangan Besar dan Eceran sebagai sektor yang efisiensi untuk peningkatan nilai PDRB. 5. Peningkatan investasi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Perdagangan Besar dan Eceran sebagai sektor untuk peningkatan nilai PAD Kabupaten Tapin. 6. Sosialisai Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah tentang insentif dan kemudahan sebagai kepastian hukum dan menciptakan kemandirian politik dan sosial budaya bagi investor. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi tentang informasi tentang insentif sebagai upaya pemberian kepastian hukum bagi investor dalam berinvestasi. 2. Sosialisasi tentang informasi tentang insentif sebagai upaya menarik investor dalam menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja 3. Peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana dalam upaya peningkatan nilai PDRB. 4. Mendorong pergeseran (shifting) dari sektor pertambangan dengan meningkatkan minat dan realisasi investasi ke subsektor lainnya yang merupakan prioritas 5. Komitmen mengenai waktu dalam penerbitan izin dalam upaya menarik investor dalam meningkatkan nilai PAD Kabupaten Tapin. 6. Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru untuk subsektor prioritas terutama untuk daerah yang kurang investasinya
STRATEGI S-T	STRATEGI W-T
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat image building Kabupaten Tapin sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik 2. Kemudahan Investasi dan pemberian insentif di sektor pertambangan dalam upaya meningkatkan daya saing Kabupaten Tapin. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan daya saing subsector-subsektor prioritas baik dalam hal penyediaan infrastruktur maupun bahan baku dan rantai pasok industri. 2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing unggul dibandingkan wilayah lain.

<p>3. Kemudahan Investasi dan pemberian insentif di sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Perdagangan Besar dan Eceran dalam upaya menarik investasi sehingga Kabupaten Tapin menjadi tujuan investasi.</p> <p>4. Arahan investasi bagi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Perdagangan Besar dan Eceran sebagai sektor yang efisiensi untuk membuka lapangan pekerjaan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.</p> <p>5. Kemudahan Investasi dan pemberian insentif investasi dengan tetap menjaga kondisi lingkungan sebagai implementasi pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tapin.</p> <p>6. Meningkatkan penanganan, pencegahan, mitigasi yang lebih efektif terhadap konservasi dan masalah-masalah lingkungan hidup.</p>	<p>3. Meningkatkan kualitas belanja untuk keperluan konservasi dan perbaikan kondisi lingkungan hidup dan mitigasi bencana.</p> <p>4. Sosialisasi tentang informasi tentang insentif sebagai upaya peningkatan daya saing</p> <p>5. Sosialisasi tentang informasi tentang insentif sebagai upaya menarik investor dalam meningkatkandaya saing Kabupaten Tapin sebagai tujuan investasi.</p> <p>6. Komitmen mengenai waktu dalam penerbitan izin bagi investasi yang berwawasan lingkungan berkelanjutan</p>
--	--

BAB IV
STRATEGI PEMBERIAN INSENTIF DAN FASILITASI KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL KABUPATEN TAPIN

4.1. Fokus Pemberian Insentif dan Fasilitas Kemudahan Penanaman Modal Kabupaten Tapin

Berdasarkan hasil analisis ekonomi dan investasi serta strategi SWOT, dapat disimpulkan sektor – sektor yang perlu mendapatkan insentif dan kemudahan investasi untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Tapin untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Tapin. Hal ini sesuai dengan tujuan utama dari usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus dan mengurangi tingkat kemiskinan, disparitas pendapatan dan tingkat pengangguran.

Fokus sektor pemberian insentif dan kemudahan investasi penanaman modal di Kabupaten Tapin terhadap beberapa sektor yang menjadi potensi untuk tahun yang akan datang dengan melihat trend pada lima tahun sebelumnya, sektor yang menjadi fokus untuk berinvestasi di Kabupaten Tapin adalah sektor pertambangan, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Perdagangan Besar dan Eceran untuk meningkatkan perekonomian dan nilai pendapatan daerah. Sedangkan sektor yang perlu menjadi fokus untuk mewujudkan tingkat bauran industri sebagai nilai tambah dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kabupaten Tapin perlu didorong dan diarahkan pada sektor industri pengolahan meskipun perkembangan sektor industri pengolahan nilai LQ masih kurang dari 1 atau non basis.

Tabel 8. Fokus Pemberian Insentif dan Fasilitas Kemudahan Penanaman Modal Kabupaten Tapin

No	Sektor	LPE	LQ	Perkembangan Investasi	Keterangan
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Menurun	Basis	Menurun	Perlu Kebijakan pemberian Insentif dan fasilitas Kemudahan secara khusus untuk mencapai pemerataan pembangunan karena sebesar 39,89 persen penduduk bekerja pada sektor pertanian (2021) dan meningkatkan investasi serta pendapatan dari sektor primer.
2	Pertambangan dan Penggalian	Meningkat	Basis	Meningkat	Sektor Pertambangan perlu mendapatkan fokus khusus dalam pemberian kebijakan insentif dan kemudahan dalam berinvestasi untuk menjaga setor pertambangan tidak terus mengalami penurunan dan berupaya menciptakan setor pertambangan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan sehingga tidak menimbulkan degradasi lingkungan di Kabupaten Tapin
3	Industri Pengolahan	Menurun	Non Basis	Meningkat	Sektor Industri Pengolahan perlu mendapatkan fokus utama dalam pemberian kebijakan insentif dan kemudahan dalam berinvestasi untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Tapin. Sektor ini nantinya diharapkan akan terkoneksi dengan sektor pertanian, Kehutanan, dan Perikanan khususnya untuk peningkatan nilai tambah pada sektor pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

No	Sektor	LPE	LQ	Perkembangan Investasi	Keterangan
4	Pengadaan Listrik dan Gas	Fluktuasi	Non Basis	Fluktuasi	Perlu Perlu Kebijakan Insentif dan Kemudahan untuk mencapai pemerataan pembangunan.
5	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, Limbah dan Daur Ulang	Fluktuasi	Non Basis	Fluktuasi	Sektor Tersier tetapi tetap perlu Perlu Kebijakan Insentif dan Kemudahan untuk mencapai pemerataan pembangunan.
6	Konstruksi	Fluktuasi	Non Basis	Fluktuasi	Sektor Kontruksi perlu mendapatkan fokus utama selain sektor industri pengolahan dalam pemberian kebijakan insentif dan kemudahan dalam berinvestasi untuk mendukung atau penunjang terealisasinya pengembangan sektor-sektor lain yang terkoneksi sehingga sector ini Bersama-sama sektor lainnya akan mampu menjadi sektor basis di Kabupaten Tapin
7	Perdagangan Besar dan Eceran	Fluktuasi	Basis	Fluktuasi	Perlu Kebijakan Pemberian Insentif dan Kemudahan untuk meningkatkan investasi dan pendapatan daerah
8	Transportasi dan Pergudangan	Fluktuasi	Non Basis	Fluktuasi	Perlu Kebijakan Pemberian Insentif dan Kemudahan untuk meningkatkan investasi dan pendapatan dari sektor transportasi
9	Penyediaan akomodasi dan Makanan Minuman	Fluktuasi	Basis	Fluktuasi	Perlu Kebijakan Pemberian Insentif dan Kemudahan untuk meningkatkan investasi dan pendapatan daerah
10	Informasi dan Komunikasi	Fluktuasi	Basis	Fluktuasi	Sektor Tersier tetapi tetap perlu Perlu Kebijakan Insentif dan Kemudahan untuk mencapai pemerataan pembangunan, meningkatkan investasi dan pendapatan daerah.

No	Sektor	LPE	LQ	Perkembangan Investasi	Keterangan
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	Fluktuasi	Non Basis	Fluktuasi	Sektor Tersier tetapi tetap perlu Perlu Kebijakan Insentif dan Kemudahan untuk mencapai pemerataan pembangunan, meningkatkan investasi dan pendapatan daerah.
12	Real Estate	Fluktuasi	Non Basis	Fluktuasi	Pemberian Kebijakan Insentif dan Kemudahan untuk meningkatkan investasi dan pendapatan dari sektor real estate
13	Jasa Perusahaan	Fluktuasi	Non Basis	Fluktuasi	Sektor Tersier tetapi tetap perlu Perlu Kebijakan Insentif dan Kemudahan untuk mencapai pemerataan pembangunan, meningkatkan investasi dan pendapatan daerah.
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial Wajib	Fluktuasi	Basis	Fluktuasi	Sektor Tersier tetapi tetap perlu Perlu Kebijakan Insentif dan Kemudahan untuk mencapai pemerataan pembangunan, meningkatkan investasi dan pendapatan daerah.
15	Jasa Pendidikan	Fluktuasi	Basis	Fluktuasi	Sektor Tersier tetapi tetap perlu Perlu Kebijakan Insentif dan Kemudahan untuk mencapai pemerataan pembangunan, meningkatkan investasi dan pendapatan daerah.
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Fluktuasi	Non Basis	Fluktuasi	Sektor Tersier tetapi tetap perlu Perlu Kebijakan Insentif dan Kemudahan untuk mencapai pemerataan pembangunan, meningkatkan investasi dan pendapatan daerah.
17	Jasa Lainnya	Fluktuasi	Non Basis	Fluktuasi	Sektor Tersier tetapi tetap perlu Perlu Kebijakan Insentif dan Kemudahan untuk mencapai pemerataan pembangunan, meningkatkan investasi dan pendapatan daerah.

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.2. Arahan dan Strategi Kebijakan

- 1) Memberikan arahan pemberian insentif bagi sektor basis yaitu sektor pertambangan, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- 2) Sosialisasi peraturan tentang insentif dan kemudahan sebagai kepastian hukum dan menciptakan keamanan politik dan sosial budaya bagi investor;
- 3) Sosialisasi tentang informasi tentang insentif sebagai upaya pemberian kepastian hukum bagi investor dalam berinvestasi;
- 4) Komitmen mengenai waktu dalam penerbitan izin bagi investasi yang berwawasan lingkungan berkelanjutan; dan
- 5) Memberikan arahan investasi bagi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan sektor industri pengolahan serta keamanan politik dan sosial budaya bagi investor di Kabupaten Tapin.

1. Strategi Pemberian insentif

- a) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah terhadap yaitu sektor pertambangan, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran;
- b) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah terhadap yaitu sektor pertambangan, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran; dan
- c) Pemberian bantuan penyertaan modal dan/atau subsidi bunga pinjaman di bank milik daerah ditujukan kepada pelaku usaha sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan sektor industri pengolahan.

2. Strategi Pemberian kemudahan

- a. Penyediaan data dan informasi penanaman modal sektor pertambangan, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran. Kemudahan memberikan data dan informasi berupa pemberian kemudahan

dalam penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal seperti:

- Peta Potensi ekonomi daerah;
- Rencana tata ruang wilayah Provinsi; dan
- Rencana Strategis dan Skala Prioritas Provinsi.

b. Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana berupa:

- Jaringan Listrik
- Jaringan jalan
- Transportasi
- Jaringan telekomunikasi; dan
- Jaringan air bersih.
- Jaminan ketersediaan energi lainnya

c. Penyediaan lahan atau lokasi;

Pemberian kemudahan dalam bentuk lahan atau lokasi diarahkan pada kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi daerah (sektor pertambangan, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran serta sektor pendukung dan penunjang seperti sektor industri pengolahan, dan sektor konstruksi) dan peruntukannya sesuai dengan RTRW Kabupaten Tapin.

d. Pemberian bantuan teknis; dan/atau

Pemberian kemudahan kepada usaha sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan sektor industri pengolahan dalam bentuk penyediaan bantuan teknis berupa bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli.

e. Percepatan pemberian perizinan.

Bentuk percepatan pemberian perijinan dilakukan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin untuk mempersingkat waktu, dengan biaya murah, prosedur secara tepat dan cepat, dan didukung sistem informasi online.

Pemberian Insentif dan fasilitasi kemudahan diberikan kepada penanam modal sesuai dengan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Fasilitasi Penanaman Modal Di Provinsi Kalimantan Selatan. Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Daerah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal kepada penanam modal di Daerah berdasarkan kewenangan, kondisi dan kemampuan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi penanam modal yang menanamkan modalnya di Daerah.

(1) **Pemberian insentif di Daerah** dapat berbentuk :

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- c. pemberian dana stimulan; dan/atau
- d. pemberian bantuan modal.

(2) **Pemberian kemudahan penanaman modal di Daerah** dapat berbentuk :

- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
- e. percepatan pemberian perizinan.

BAB V

PENUTUP

kajian untuk mendapatkan sektor potensial yang dimiliki oleh Kabupaten Tapin yang selanjutnya didorong menjadi sektor prioritas serta fokus untuk dikembangkan melalui kegiatan penanaman modal sebagai dasar pemberian insentif dan fasilitasi kemudahan penanaman modal. Kajian yang dilaksanakan mengemukakan bahwa Kabupaten Tapin mempunyai potensi investasi yang melimpah yang mampu untuk membuat masyarakatnya maju dan sejahtera seperti yang dicita-citakan. Namun demikian perlu adanya upaya serius untuk mengambil langkah-langkah kebijakan untuk membuat penanaman modal yang memajukan perekonomian yang bertumbuh secara berkelanjutan dapat terealisasi dengan tepat.

Hasil kajian pemberian insentif dan fasilitasi kemudahan penanaman modal di kabupaten Tapin diharapkan dapat menjadi landasan bagi kegiatan perumusan rencana penanaman modal dan pemberian insentif dan fasilitasi kemudahan penanaman modal di kabupaten Tapin. Kegiatan tersebut pada akhirnya tidak boleh terlepas dari arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kabupaten Tapin. 2022. Kabupaten Tapin Dalam Angka 2022. Rantau.
- BPS Kabupaten Tapin. 2022. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tapin Menurut Lapangan Usaha 2017-2021. Rantau.
- BPS Kalimantan Selatan. 2022. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Di Kalimantan Selatan Menurut Lapangan Usaha 2017-2021. Banjarbaru.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin, 2021. Perkembangan Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Menurut Sektor Tahun 2020 dan 2021.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tapin No. 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Fasilitas Penanaman Modal Di Provinsi Kalimantan Selatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
- Sukirno, Sadono. 2000. Pengantar Teori Mikroekonomi. Jakarta: Rajawali. Syaihu Akhmad, (2012). Pengaruh Investasi Pemerintah Dan Investasi Swasta Terhadap Kesempatan Kerja Dan Pengangguran Di Provinsi Kalimantan Timur. Jurnal Ekonomi Pembangunan 10(1),
- Todaro, Michael P. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. (Ed.VII). Jakarta: Erlangga.